



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 01 / PANSEL-JPT/ PEG.02.01/ 06/ 2021
TENTANG

SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) MADYA/PRATAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil serta Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka sebagai berikut :

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA		
NO	NAMA JABATAN	ESELON
1.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	I/a
2.	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana*)	I/a
3.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	I/a
4.	Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan	I/b
5.	Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi	I/b
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
NO	NAMA JABATAN	ESELON
1.	Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	II/a
2.	Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	II/a
3.	Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan	II/a
4.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	II/a
5.	Asisten Deputi Revolusi Mental	II/a
6.	Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan	II/a

Deskripsi jabatan lebih rinci sebagaimana tercantum pada **Lampiran A** pengumuman ini. Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang **bertanda *)** dapat diisi dari kalangan Non-PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Bagi Calon Pelamar dari kalangan Pegawai Negeri Sipil

▪ Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

1. Pendidikan minimal pasca sarjana (S2) dengan Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang program studinya terakreditasi paling rendah bernilai baik atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Memiliki pengalaman, kepemimpinan dan kompetensi jabatan yang dilamar;
3. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. Pernah/sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Pratama, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);
5. Pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Utama dengan golongan ruang (IV/d) selama minimal 2 (dua) tahun;
6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
7. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 September 2021;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklat PIM Tk. I) dan/atau Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tk. II);
10. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
11. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
12. Telah menyerahkan LHKPN dan SPT Tahunan 2020.

▪ Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

1. Pendidikan minimal sarjana Strata Satu (S1), diutamakan yang telah lulus pendidikan pasca sarjana (S2) dengan Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang program studinya terakreditasi paling rendah bernilai baik atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapat penetapan penyetaraan Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Memiliki pengalaman, kepemimpinan dan kompetensi jabatan yang dilamar;
3. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Pernah/sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)
5. Pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Madya dengan golongan ruang (IV/b) selama minimal 2 (dua) tahun.
6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
7. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 September 2021
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tk. II) dan/atau Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III);
10. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
11. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
12. Telah menyerahkan LHKPN bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan struktural Eselon II dan LHKASN bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan struktural Eselon III atau fungsional tertentu jenjang Madya serta SPT Tahunan.

B. Bagi Calon Pelamar dari kalangan Non-PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Pendidikan minimal pasca sarjana (S2) dengan Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang program studinya terakreditasi paling rendah bernilai baik atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Memiliki pengalaman, kepemimpinan dan kompetensi jabatan yang dilamar;
4. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Untuk Jabatan yang terbuka bagi pelamar yang berlatar TNI/POLRI dengan sekurang-kurangnya memiliki pangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama dari pelamar yang berlatar TNI dan Brigadir Jenderal Polisi dari pelamar yang berlatar POLRI selama minimal 2 (dua) tahun;
6. Tidak menjadi anggota/ pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
7. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
8. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
9. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 September 2021;
10. Sehat jasmani dan rohani;
11. Tidak Pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau pegawai Swasta;
12. Bagi Prajurit TNI dan Anggota POLRI dapat diangkat dalam JPT Madya setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari dinas Aktif;
13. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
14. Pernah memimpin institusi berskala nasional/internasional;
15. Diutamakan pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi;
16. Bersedia membuat surat pernyataan berhenti dari kepengurusan dan/atau anggota partai politik, apabila diangkat sebagai JPT Madya;
17. Telah menyerahkan SPT Tahunan.

II. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pengumuman jadwal seleksi terbuka dilakukan melalui website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di <http://www.kemendikopmk.go.id>
2. Pengumuman beserta dengan lampiran dapat di *download* melalui website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Seluruh kelengkapan dokumen lamaran dapat disampaikan melalui Pos atau diantar sendiri langsung dan ditujukan kepada :

**Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta 10110**

dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan format **Lampiran B**;
- b. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format **Lampiran C**;
- c. Fotocopy KTP/SIM/Paspor;

- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotocopy ijazah yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - f. Fotocopy bukti penyerahan SPT Tahunan;
 - g. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ditulis nama dibagian belakang;
 - h. Khusus bagi PNS:
 - Fotocopy SK CPNS dan PNS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotocopy SK Kepangkatan dan Jabatan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim Tingkat III/ II/ I/ Lemhannas);
 - Fotocopy sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (apabila ada);
 - Fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotocopy bukti penyerahan LHKPN dan/atau LHKASN;
 - i. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir, sesuai dengan format **Lampiran D**;
 - j. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman, serta hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, sesuai dengan format **Lampiran E**;
 - k. Surat pernyataan persetujuan dari **Pejabat Pembina Kepegawaian** jika melamar untuk calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan dari **Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Yang Berwenang** jika melamar untuk calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memberikan ijin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sesuai dengan format **Lampiran F**;
4. Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 3 huruf a sampai dengan k, dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup berwarna coklat dan sudah diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 15 Juni 2021 **pukul 16.30 WIB**;
 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya/Pratama melalui email: panseljpt@kemenkopmk.go.id.

III. KETENTUAN LAINNYA

1. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi selama proses seleksi dan kepada peserta untuk berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggungjawab dalam proses seleksi ini.
2. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, dan tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Berkas administrasi yang akan diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lolos/lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
4. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administratif tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
6. Seluruh Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
7. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat digugurkan secara sepihak.

IV. TAHAPAN SELEKSI

- 1. Seleksi JPT Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administratif;
 - b. Penelusuran Rekam Jejak Calon JPT Madya/Pratama;
 - c. Seleksi Kompetensi:
 - Penulisan Makalah; dan
 - Wawancara; dan
 - d. Assessment;
 - e. Tes Kesehatan.
- 2. Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman resmi dan di website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan alamat: <http://www.kemenkopmk.go.id>

V. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KET
1.	Pengumuman	2 Juni 2021	
2.	Pendaftaran bagi Calon JPT Madya dan Pratama	2 Juni – 15 Juni 2021	
3.	Pemeriksaan dan Seleksi Administratif	16 – 17 Juni 2021	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administratif	18 Juni 2021	
5.	Penelusuran Rekam Jejak Calon	18 Juni – 16 Juli 2021	
6.	Penulisan Makalah	22 Juni 2021	
7.	Penilaian Penulisan Makalah	23 – 25 Juni 2021	
8.	Pengumuman Penulisan Makalah	29 Juni 2021	
9.	Assessment Test	5 Juli – 6 Juli 2021	
10.	Tes Wawancara	15 – 16 Juli 2021	
11.	Pengumuman Hasil Seleksi	2 Agustus 2021	

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, setiap perubahan jadwal akan diberitahukan melalui Website dan email.

Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman resmi dan di website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan alamat: <http://www.kemenkopmk.go.id>

Jakarta, 2 Juni 2021

Ketua Panitia Seleksi,



[Signature]
Y.B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN A

DESKRIPSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA			
NO.	NAMA JABATAN	ESELON	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	I/a	a. Tugas : menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan sosial. b. Fungsi : 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembagayang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan sosial; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesejahteraan sosial; 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kesejahteraan sosial;
2.	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana*)	I/a	a. Tugas : menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana. b. Fungsi : 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembagayang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembagayang terkait dengan isu di bidang pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana; 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana;

3.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	I/a	a. Tugas : menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. b. Fungsi : 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama; dan 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama;
4.	Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan	I/b	a. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator di Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan.
5.	Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi	I/b	a. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi.
6.	Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	II/a	a. Tugas : melaksanakan pengelolaan data dan informasi. b. Fungsi : 1) koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; 2) pengembangan dan penerapan sistem informasi; 3) pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis; dan 4) pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi.

7.	Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	II/a	a. Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi bencana dan konflik sosial. b. Fungsi : 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi bencana dan konflik sosial; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang mitigasi bencana dan konflik sosial; 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang mitigasi bencana dan konflik sosial.
8.	Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan	II/a	a. Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan kesehatan. b. Fungsi : 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan kesehatan; 5) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan kesehatan; dan 6) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di peningkatan pelayanan kesehatan.
9.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	II/a	a. Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

			b. Fungsi : 1) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
10.	Asisten Deputi Revolusi Mental	II/a	a. Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang revolusi mental. b. Fungsi : 1) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang revolusi mental; 2) penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang revolusi mental; dan 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang revolusi mental.
11.	Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan	II/a	a. Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keagamaan. b. Fungsi : 1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keagamaan; 2) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan keagamaan; dan 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan keagamaan.

LAMPIRAN B
FORMAT SURAT LAMARAN

..... ,

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
di –
Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021, Nomor 01/PANSEL-JPT/PEG.02.01 / 06 / 2021, tanggal 2 Juni 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Mengajukan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya / Pimpinan Tinggi Pratama *) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk jabatan:

dan bersedia mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan dokumen lamaran pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

tanda tangan

(nama pelamar)

NIP. pelamar

*) Pilih salah satu (coret yang tidak perlu)

LAMPIRAN C

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap		
2.	NIP		
3.	Pangkat dan Golongan Ruang		
4.	Tempat Lahir/Tgl. Lahir		
5.	Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)	
6.	Agama		
7.	Status Perkawinan	Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda *)	
8.	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
8.	Alamat Rumah	a. Jalan	
		b. Kelurahan/Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Propinsi	
9.	Nomor Telpon / HP		
10.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. Berat badan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk muka	
		e. Warna kulit	
		f. Ciri-ciri khas	
		g. Cacat tubuh	
11.	E-mail		

*) Coret yang tidak perlu

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal di Dalam dan Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZA H TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/ DIREKTUR / DEKAN PROMOTO R
1	2	3	4	5	6	7
1.	DI					
2.	DII					
3.	DIII/AKADE MI					
4.	DIV					
5.	S1					
6.	S2					
7.	S3					
8.	Spesialis I					
9.	Spesialis II					
10.	Profesi					

2. Diklat Teknis di Dalam dan Luar Negeri

NO.	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/ TGL/BLN/THN/ S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/ TANDA LULUS/ SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

3. Diklat Kepemimpinan

NO.	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/ TGL/BLN/THN/ S/D TGL/BLN/THN	IJAZAH/ TANDA LULUS/ SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

I. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang dan Penggajian

NO.	PANGKAT	GOL RUANG PENGGAJIAN	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	SURAT KEPUTUSAN		
				PEJABAT	NOMOR	TGL.
1	2	3	4	5	6	7

2. Pengalaman Jabatan/ Uraian Pekerjaan

NO	JABATAN/ URAIAN JABATAN	MULAI DAN SAMPAI	SURAT KEPUTUSAN			CAPAIAN PRESTASI
			PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7

IV. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU
1.	

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

.....

Yang membuat,

(.....)

PERHATIAN:

1. kolom yang kosong diberi tanda - .

LAMPIRAN D
SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENGURUS ATAU
ANGGOTA PARTAI POLITIK SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala resiko sesuai ketentuan yang berlaku.

.....

tanda tangan

(nama pelamar)

*) Pilih salah satu (coret yang tidak perlu)

LAMPIRAN E
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Selaku atasan dari:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021.

.....

tanda tangan

(nama terang)

*) Pilih salah satu (coret yang tidak perlu)

LAMPIRAN F

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN/PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERIKAN IJIN UNTUK
MENGIKUTI RANGKAIAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Yang Berwenang *) menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama **) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021, dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

.....

tanda tangan

(nama terang)

Keterangan :

- *) Untuk yang melamar calon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, wajib untuk persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian
- **) Pilih salah satu (coret yang tidak perlu)